

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Nomor: 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks)



**OLEH:
SATRIA HERYANTO JOEWONO
B 111 12 003**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Nomor: 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**

**OLEH:
SATRIA HERYANTO JOEWONO
B 111 12 003**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan PN Makassar No.429/Pid.Sus/2015/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

SATRIA HERYANTO JOEWONO
B11112003

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 21 November 2016
Dan dinyatakan diterima

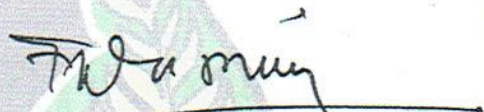
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.
NIP. 1963 1024 1989 031 002

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, SH.,M.H.
NIP. 1962 0618 1989 031 002

**An. Dekan
Wakil Dekan I**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi atas mahasiswa :

Nama : **SATRIA HERYANTO JOEWONO**
Nomor Induk : **B 111 12 003**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus
No.429/Pid.Sus/2015/PN.Mks.)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12-Mei 2016

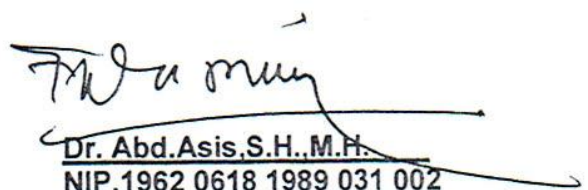
Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H
NIP. 1963 1024 1989 031 002



Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP.1962 0618 1989 031 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSIKRISI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SATRIA HERYANTO JOEWONO
Nomor Pokok : B11112003
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban ~~Pidana~~ Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus
Nomor:429/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

SATRIA HERYANTO JOEWONO (B 111 12 003) dengan judul skripsi **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan PN Makassar No.429/Pid.Sus/2015/PN.Mks).”** di bawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Bapak Asis sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) penerapan materil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. 2) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan PN Makassar No.429/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji. selain itu. Penulis juga melakukan bedah putusan dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : **pertama**, Penerapan hukum materil terhadap kasus yang diteliti oleh penulis sudah cukup jelas dan berkesesuaian di terapkannya dakwaan tunggal sebagaimana JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004. Uraian pasal yang dimuat dalam tuntutan sudah jelas dan telah memenuhi semua unsur yang ada dalam dakwaan maka penulis berkesimpulan bahwa tuntutan penuntut umum sudah tepat dan sah. Dan **kedua** dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasarkan pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hakim hakim beranggapan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan penelantaran rumah dalam tangga.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan ridho-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga No.429/Pid.Sus/2015/Pn.Mks”** sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi secara maksimal. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua Penulis. **Ayahanda** tercinta **Bambang Atmo Joewono**, dan **Ibunda** tercinta **Dra. Heryati Zainuddin** yang senantiasa mendoakan segala kebaikan untuk Penulis, mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kepada saudara Penulis, **Kakanda Bulgis Fitrianti Joewono**, dan **Novi Puri**

Astuty yang senantiasa menjadi pemacu serta contoh yang baik bagi Penulis.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. dan Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang dalam kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan dengan penuh kesabaran dan kasih

sayang layaknya seorang ibu dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Dr. Dara Indrawati S.H., M.H. selaku Tim Penguji, yang senantiasa memberikan saran/masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis atas waktu dan nasehat yang diberikan kepada Penulis.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Mustari, S.H. selaku staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar yang telah memfasilitasi Penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
10. Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH), khususnya kakanda senior yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap keluarga Petitum 2012 yang merupakan angkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah

bersama-sama dengan penulis dalam menempuh pendidikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini. Semoga sukses selalu mengiringi langkah kita semua.

12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan do'a, motivasi, serta sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Segenap kemampuan telah Penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian, Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, Penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang bersifat konstruktif akan menjadi masukan yang berguna bagi Penulis menuju kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah di berikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Mei 2016

Penulis,

Satria Heryanto Joewono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
B. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
C. Pertanggungjawaban	
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku Penelantaran Rumah Tangga	21
D. Penelantara	
1. Pengertian Penelantaran orang	22
2. Pengertian Penelantaran dalam lingkup rumah tangga	25
3. Penelantaran menurut hukum positif.....	25
4. Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga ...	27
5. Unsur- unsur pelantaran dalam rumah tangga.....	29
6. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan tentang Penelantaran Orang.....	32

7. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku penantaran dalam rumah tangga.....	37
8. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Teknik pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dari Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penelamtaran Rumah Tangga No.429/Pid.Sus/2015/Pn.Mks	45
1. Posisi Kasus.....	45
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga	46
3. Analisis Penulis	50
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.	56
1. Pertimbangan Hakim.....	56
2. Amar putusan.....	61
3. Unsur pertimbangan.....	62
4. Analisis Penulis	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya di jumpai dalam novel, dan di negara-negara lain, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang sering kali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga di bangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantar keduanya. Aka tetapi, pada Kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut Pasal 33 Undang-undang (selanjutnya disebut uu) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Bahkan, suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU

Perkawinan). Ada pun UUPerkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan fenomena ini (Harkristuti Harkrisnowo, 2008:54) mengungkapkan: Fenomena yang memprihatikan adalah bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat isu global, cukup lama tidak, mendapat perhatian di Indonesia. Menguk kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tau tampak harmonis dan karenanya sulit untuk mengakui adanya masalah.

Untuk menanggapi fenomena tersebut maka pada tahun 1997 sebagai respon terhadap dekade perempuan internasional, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia memasukkan kebijakan perempuan dalam Garis-garis Besar Hukum Negara (selanjutnya disingkat GHBN) yang populer dengan kebijakan ganda perempuan, dan selanjutnya berdasarkan uu No.5 Tahun1998, tentang pengesahan "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tereatment or Punishment*" (Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau pemenuhan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia). Dengan disahkannya konvensi ini, maka Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan melaksanakan konvensi dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan

wilayah suatu Negara, terutama dalam hal perlindungan bagi perempuan akan semakin membantu membiarkan rasa keadilan terhadap tindakan kekerasan yang di alami perempuan. Tentunya hal ini juga semakin menunjukan keseriusan pemerintah dalam memberikan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketidak pedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karna adanya ideology gender dan budaya patriarki. Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang di hubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan perempuan.

Ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah dilegitimasi di semua aspek kehidupan. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang domestik, seperti rumah tangga dan reproduksi dikategorikan privat dan bersifat personal misalnya: relasi suami-istri, keluarga dan seksualitas. Hal-hal yang bersifat domestik dan prifat ini merupakan hal yang berada di luar campur tangan masyarakat/ individu lain dan Negara. Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut juga berpengaruh pada ketentuan di dalam Pasal 31 uu perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi

tersebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

Selain itu, juga ada kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalakan korban. Hal ini di pengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis. Bahkan, walaupun kejadian laporkan, usaha untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku sering mengalami kegagalan, khususnya terhadap perempuan tidak pernah sigap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi sulit di tangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul diantara suami-isteri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terkait di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antara individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. UU Perkawinan tidak

mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (pidana).

Dengan sering muncul berita dalam media masa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHPidana) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHPidana tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan pelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam uu No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT).

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki UU Perkawinan dan KUHP maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan public mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah merupakan tuntutan masyarakat

yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UU NKRI Tahun 1945) untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diretifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat Penghapusan DPT).

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari Pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga bukan semata-mata merupakan unsur privat, melainkan juga masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui UU Penghapusan KDRT. Meskipun demikian, lahirnya UU Penghapusan KDRT tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan rumah tangga dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Dalam uu No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT) telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah “pelantaran rumah tangga”

dimana tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga .

Hal-hal yang dipaparkan di atas, dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui dengan penelantaran rumah tangga dan melihat bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga tersebut, maka akan diulas dalam skripsi ini, judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor: 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil (pertanggungjawaban pidana) penelantaran dalam rumah tangga
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga pada pada putusan: 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran keluarga dalam rumah tangga.
- b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku penelantaran keluarga dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindakan suami menelantarkan istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar
- 2) Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindakan penelantaran keluarga dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:³

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;

¹Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, Hlm. 18

² Ibid

³ Ibid Hlm. 18-19

2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:⁴

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁵

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik, yakni:⁶

Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:⁷ *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

⁴ Ibid. Hlm. 19

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:⁸

strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*ederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari karya Lamintang, sebagai:⁹

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah:¹⁰

Suatu tindakan melanggar hukum melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.¹¹

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met deon*,

⁸ Ibid Hlm. 20

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

negatif/maupun akibatnya).¹²

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.¹³

Penggunaan istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno adalah sebagai berikut¹⁴

Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tunduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal-pasal sendiri maupun

¹² Ibid. Hlm. 22

¹³ Ibid. Hlm. 23

¹⁴ Ibid

dalam penjelasannya hampir semua selalu dipakai kata “perbuatan”.¹⁵

Dari

beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojickoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya hukum acara pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”¹⁶

Demikian halnya dengan Satochid Kartanegara dimana dalam menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handling*), dan/ atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*).¹⁷

Istilah perbuatan menurut Satochid adalah berarti melakukan, berbuat (*active handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana *straabaarfeit* yang telah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh

¹⁵ Ibid. Hlm. 23

¹⁶ Ibid. Hlm. 24

¹⁷ Ibid

pada istilah delik.¹⁸

Bukan saja Satochid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (*strafbaarfeit*), tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna *strafbaarfeit*. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya jatuh pada istilah delik.¹⁹

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²⁰

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid Hlm. 27

(*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu).²¹

Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²²

²¹ Ibid

²² Ibid. Hlm 27-28

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:²³

1. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*fait*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

²³ Ibid. Hlm. 49-50

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outard conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah, dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).²⁴

b. Ada Sifat Melawan Hukum(wederrechtelijk)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:²⁵

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale ederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengucualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undan, sebab hukum adalah Undang-Undang.

2. Sifat melawanhukum materil (*materiele ederrecht elijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi

²⁴ Ibid. Hlm. 28

²⁵ Ibid. Hlm. 53

pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan pokok pada dua pendapat tersebut diatas, adalah:²⁶

a). Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melaan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum tertulis), seperti:

- Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);
- Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodeer*);
- Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-Undang);
- Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah)

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum yang tertulis) juga yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

b). Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari

²⁶ Ibid. Hlm. 53-54

setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan tegas.

c. Tidak Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: *“Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht isgedrongen.”*²⁷

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang-Undang.²⁸

Pasal (1) KUHP (terjemahan) mengatakan:
Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang pada saat itu yang melawan.”

3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP

Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan):

“barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.

²⁷ Ibid. Hlm.58

²⁸ Ibid, Hlm. 66

Sederhana sekali bunyinya Undang-Undang ini. Namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh Pemerintah beserta DPR) atautkah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materil sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.²⁹

4. Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP

Pasal 51 KUHP menyatakan

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memeberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Hoge Raad* memutuskan baha perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah diperlukan hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bahaan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) : Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan di minta prtolongan kepada penguasa yang umum

²⁹ Ibid Hlm. 68

tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut.” Dan seterusnya.

1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana

Penelantaran Rumah Tanga

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan dan/atau pidana denda. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya, yakni sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari ibu; kebanyakan kasus penelantaran dilakukan oleh ayah, sehingga anak untuk selanjutnya dinafkahi, dirawat atau dipelihara oleh ibunya.
- b. Perlindungan dari keluarga dekat; anak kemudian diasuh oleh keluarga dekat orang tuanya.
- c. Perlindungan dari Dinas Sosial; anak dirawat dan dipelihara oleh dinas sosial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, yang dilakukan dengan cara memberikan bekal keterampilan, pembinaan rohani, 75 76 perawatan dari psikolog untuk menghilangkan trauma

d. oleh karena orang tuanya dan untuk kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat. 3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum efektif dalam menangani kasus penelantaran anak di dalam rumah tangga, mengingat belum memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penelantaran anak yang semakin meningkat setiap tahunnya.³⁰

D. Penelantaran

1. Pengertian Penelantaran Orang

Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran Orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo Ps 9).³¹

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga (Achie Sudiarti

³⁰ <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender>>[20 januari 2010 pukul 07.18]

³¹ Ibid

Luhulima, 2000:68). Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.

Dalam tindak pidana penelantaran orang ini berupa penelantaran terhadap istri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan. Dalam proses pembentukan uu Penghapusan KDRT muncul wacana untuk mengkonstruksikan “dalam lingkup rumah tangga” termasuk di dalamnya adalah pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan yakni seperti tersebut dalam Usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Komnas perempuan.³²

Orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga mengingat uu tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah

³² Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. Bandung : Fokus Media

- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Yang dimaksud dengan isteri atau suami atau mantan isteri/suami adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami *de jure* yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami *de facto* yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah Undang-undang tertulis .

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sangat bermacam-macam jenisnya, dan dalam penelitian ini akan membahas masalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu isteri dan anak, yang mana dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, terutama Pasal 49 diatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana

penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang.”³³

2. Pengertian Penelantaran keluarga dalam lingkup rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).³⁴

3. Pelantaran Menurut Hukum positif

Penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *Strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Sebagaimana Pasal 5 huruf d uu Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kategori Peristiwa Pidana ada yang disebut Komisionis, Omisionis, dan Komisionis Peromisionim. Komisionis adalah Terjadinya delik karena melanggar

³³ Ibid

³⁴ Ibid

larangan, sedangkan Omsionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat. Dan Komisionis Peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan/tidak berbuat. Perlu adanya peningkatan penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga.³⁵

Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindakan penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran. Tapi sebelum diproses peradilan pidana lebih jauh, polisi dapat menggunakan wewenang diskresi yang dimiliki untuk menempuh prosedur restorative justice, yaitu upaya penyelesaian secara musyawarah, namun bila secara musyawarah tidak memberikan perbaikan bagi korban, maka proses peradilan pidana diteruskan sesuai aturan yang berlaku. Hukum harus ditegakkan agar pelaku jera (personal

³⁵ Ibid

deterrence) serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga (general deterrence).

4. Bentuk-Bentuk Penelantaran Istri Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga

Menurut Pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT adalah:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.³⁶

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif gender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti: "Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dalam atau diluar yang menghasilkan uang, barang dan atau jasa, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.³⁷

Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan di dalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif dewan perwakilan rakyat, tanggal 6 Mei 2003. Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah:³⁸

“Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan control terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan anggota keluarga.”

Definisi yang diberikan oleh badan legislatif diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam uu tentang penghapusan KDRT tampak bahwa pembuat uu cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi Penelantaran rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilanya tersebut kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki akses.³⁹

³⁷ Fajar Utomo. *Berani Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
<http://cetak.fajar.co.id/kolom/news.php?newsid=272>. [11 januari 2010]

³⁸ Solar Energi Charity. *Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* <http://jurnal-hukum.blogspot.com/2007>

³⁹ Ibid

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam uu, hal ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, Undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Namun unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya dapat dibagi atas:⁴⁰

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang Objektif
- e. Unsur melawan hukum yang Subjektif.

Dalam Pasal 9 uu No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

disebutkan:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

⁴⁰ Peri Umar Farouck.2015, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment program, justice for the poor project*. Sinar Grafika Jakarta Hal 11

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 di atas dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantarkan istri adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 uu No.23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah perbuatan menelantarkan rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.
- b. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan strfbbaar feit, sekalipun tambahan. Sehingga unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran istri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri.

⁴¹ Ibid

- c. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 uu No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran istri.
- d. Tindakan menelantarkan istri setelah keluarnya uu No.23 Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum objektif yang terdapat dalam Pasal 9 uu No.23 Tahun 2004 adalah “Setiap orang dilarang....”
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subjektif ini relatif belum lama dan pertama timbul di Jerman. Dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran istri yang menjadi unsur melawan hukum yang subjektifnya adalah niat suami.

6. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan tentang Penelantaran Orang ⁴²

a. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

⁴² Ibid

psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 2, uu Nomor 23 Tahun 2004). Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 uu Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Sanksi dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga seperti yang tertuang dalam uu Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 adalah :
xlvii “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴³

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik xlviii dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran orang terutama di dalam Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, yang berbunyi :

Pasal 304:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal 305:

“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

d. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia xlix atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, dikatakan bahwa Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama (Vide Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999). Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, berisi bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- 3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Sedangkan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi :

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
- 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman

7. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku pelantaran dalam rumah tangga

Undang undang No.23 tahun 2004 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 49

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

8. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau

kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum beserta sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada

saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwa sahnya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP). Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijkdwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis , karena di anggap berkesesuaian judul yang diangkat oleh penulis.

B. Jenis Jenis Dan sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran keluarga di kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan. Data diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi di Kota Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deksriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga No. 429/Pid. Sus/2015/Pn.Mks

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum materiil terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus putusan nomor 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang. Terdakwa dalam kasus ini bernama Haris Ibrahim DG Limpo sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2013 bertempat di Jl. Alauddin Lr. 2D No. 20 kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban Pr. Ratna DG Ratang yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 428/24/VII/1996 tanggal 09 September 1995, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang merupakan suami sah dari Pr. Ratna

DG Ratang dan telah dikarunia tiga orang anak, memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Di mana sejak itu terdakwa sudah tidak lagi melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban terdakwa sebagai kepala rumah tangga dengan member nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa.

Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan pada PT. Gas Samator, sehingga terdakwa masih mempunyai penghasilan tetap untuk dapat memberikan nafkah pada Istri dan anak-anak terdakwa.

Hubungan antara terdakwa Haris Ibrahim DG Limpo dan Pr.Ratna DG Ratang masih sebagai suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah karna belum pernah ada perceraian melalui Pengadilan Agama.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan terdakwa harus menjalankan pidana penjara akibat perbuatannya yang dilakukan terdakwa harus mempertanggungungkan perbuatannya baik itu berupa pidana denda, sebab perbuatan yang dilakukannya secara terang – terangan telah dilarang oleh perundang undangan. Di dalam hal pertanggung pidana ada beberapa macam tanggung gugat antara lain :

1. *contractual liability* tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban dan hubungan kontraktual yang sudah

disepakati. Di lapangan kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukan keberhasilan, karena *health care provider*

2. Vicarius liability atau respondent superior ialah tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku yang ada dalam tanggung jawabnya (*sub ordinate*)misalnya pelaku akan bertanggung gugat atas kerugian yang diakibatkan kelalaiannya.
3. *Liability in tort liability in tort* adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum (*ontechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum. Kewajiban hukum baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Akan tetapi termasuk juga yang berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain

Menurut Professor W.L yang dikutip oleh Dagi menyatakan apabila seorang telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan kesalahan maka ia akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Sebuah perbuatan memiliki konsekuensi. Adakalanya konsekuensi melahirkan pertanggung jawaban, tetapi ada pula yang tidak. Sebuah pertanggung jawaban dalam hukum akan muncul ketika perbuatan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana Indonesia

menganut menganut azas dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Ada beberapa istilah tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain delict (deik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, criminal act, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu tindak perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman pidana.

Terdapat 5 (lima) unsur pidana menurut Moeljatno, yaitu ;

1. Kelakuan dan akibat
2. Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang subjektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Pertanggung jawaban pidana dipandang tidak ada, kecuali ada alasan –alasan penghapus pidana. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang perbuatan tidak memiliki defence, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana. Hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya

mempunyai defence ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak mendakwakan dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang di dakwa dan di tuntutan itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya memintapertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti “rightfully sentences” melainkan “rightfully accused” pertanggung jawaban pidana pertama-pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

3. Analisis Penulis

Dalam kasus yang di teliti, JPU menerapkan dakwaan tunggal No: PDM-136/MKS/Ep.1/01/2015 yaitu dakwaan Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penulis, penerapan dakwaan Pasal 49 huruf a sudah tepat. Akan tetapi, melihat peran terdakwa dan kronologis perkara yang di dapatkan berdasarkan hasil penyidikan, yaitu terdakwa HARIS IBRAHIM DG. LIMPO telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban Pr. RATNA DG. RATANG yang merupakan istri sah terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Yang di maksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau subjek pelaku / siapa pelaku yang mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dalam persidangan ini, HARIS DG. LIMPO diajukan sebagai terdakwa atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya yang dapat terlihat dari sepanjang persidangan perkara di langsungkan, keadaan, sikap terdakwa telah dewasa, dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan,

dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi dan surat serta keterangan terdakwa sendiri yang di peroleh di persidangan pengadilan telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban RATNA DG. RATANG, dengan cara terdakwa yang masih berstatus sebagai suami sah (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 428/24/VII/1996 tanggal 09 September 1995) dari korban telah meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2013, di mana sejak saat itu terdakwa tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tanggayang berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saksi korban, hanya bergantung kepada sanak sodara yang merasa iba kepada saksi korban.bahwa terdakwa saat ini terdakwa masih bekerja sebagai karyawan PT.Gas Samator, sehingga terdakwa masih mempunyai penghasilan yang tetap untuk dapat memberikan nafkah kepda istri dan anak-anak terdakwa.bahwa hubungan antara terdakwa HARIS IBRAHIM DG. LIMPO dan Pr.RATNA DG. RATANG masih sebagai suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah karena belum pernah ada perceraian melalui Pengadilan Agama.

Dengan demikian unsur “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa HARIS IBRAHIM DG. LIMPO telah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana di atur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dakwaan JPU yang berbentuk tunggal dengan memasukkan Pasal 49 membahas tentang siapakah yang di maksud dengan pelaku tindak pidana tersebut, lebih jelasnya, Penulis akan menguraikan pengertian pelaku dan kualifikasi pelaku tersebut di bawa ini.pengertian pelaku dalam hukum pidana selalu di kaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tersebut, maka terlebih dahulu harus di tentukan tentang siapakah pelaku tindak pidana tersebut. Pengertian pelaku dalam hukum pidana Martiman Prodjohamidjojo adalah “pertama tama dia melakukan elemen-elemen dari perbuatan pidana “pertama-tama diaa melakukan elemen-elemen dari perbutan pidana, yang di rumuskan dalam rumusan delik”.

Menurut Lobby Loeqman pelaku tindak pidana ada dua, yaitu “pelaku dalam arti sempit yakni hanya mereka yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku”.

Adapun klasifikasi pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 9 Undang-undang No.23 Tahun 2004 disebutkan:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagai mana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagai mana di maksud Pasal 9 ayat (2)

Dari uraian unsur-unsur rumusan tindak pidana yang di lakukan JPU tersebut di atas, JPU telah cermat pada penjatuhan hukuman yang memberatkan terdakwa.

Oleh karna itu, menurut penulis, bahwa semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif dalam Pasal yang di tentukan

JPU merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dituduhkan dan di buktikan.

Kesimpulan dari apa yang di jelaskan Penulis di atas adalah bahwa JPU dalam menerapkan hukum matril tampak sudah konsisten, dalam penjatuhan pidana hal itu di lihat dari :

1. Dalam persidangan, JPU berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004
2. JPU melakukan pembuktian terhadap unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, dalam dakwaan tersebut
3. Dalam surat dakwaan, jelas jelas bahwa dakwaan di susun secara tunggal sehingga JPU menerangkan bahwa tersangka di hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis dakwaan penuntut umum sudah cukup jelas di terapkannya dakwaan tunggal yaitu JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan di persidangan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap, maka JPU berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 yang dituangkan dalam surat tuntutan yang unsur-unsurnya (surat tuntutan No: PDM-136/MKS/Ep.1/01/2015) sebagai berikut :

a. Unsur “barangsiapa”

b. Unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

Dari uraian unsur-unsur rumusan tindak pidana yang di lakukan JPU tersebut di atas, tampak terlihat kecermatan JPU dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yaitu dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 di rumuskan sebagai brikut :

Barang siapa menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagai mana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah),

Terkait persoalan rumusan unsur tindak pidana, dalam hukum pidana Indonesia, rumusan unsur tindak pidana mempunyai fungsi yang sangat penting. Jika diteliti, maka unsur tindak pidana mempunyai dua fungsi (⁴⁴) yaitu yang pertama (secara hukum pidana materiil), terkait penerapan dari asas legalitas, maka sanksi pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang terlebih dahulu di tentukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembentuk Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang melakukan hal ini melalui rumusan delik. Yang kedua (secara hukum acara pidana) dapat dijadikan sebagai fungsi petunjuk bukti.

Syarat tertulis untuk dapat di pidan harus di tuduhkan dan di putuskan. Syarat umum tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak usah

⁴⁴ D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, 2007 : 24

dituduhkan dan dibuktikan, tetapi dianggap ada kekecualian kalau diinginkan secara nalar.

Oleh karna itu, menurut penulis, bahwa semua unsur yang terkandung dalam unsure subjektif dan unsur objektif dalam Pasal yang ditentukan JPU merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dituduhkan serta di butuhkan. Artinya, salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak dituduhkan oleh JPU.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa di perhadapkan kepersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagai mana dalam dakwaan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan beberapa saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut:

Saksi RATNA Dg. RATANG, ST ERNI NURSYAM dan SUTISNA KARIM telah memberikan keterangan sesuai apa yang di berikan kepada penyidik dan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa ;

Saksi RATNA DG. RATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab di mintai keterangannya sehubungan dengan menerangkan telah terjadi tindak pidana penelantaran terhadap diri saksi dan anak saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya terjadi saejak bulan januari 2013 bertepatan di JL. St.Alauddin Lr. 2 D No. 20 Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi adalah istri sah terdakwa, hal ini di dibuktikan dengan adanya surat atau akte nikah no.reg 428/24/VII/1996 tanggal 09 September 1995 yang di keluakan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate Makassar.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa adalah karyawan tetap PT. Aneka Gas (Samator) dan memiliki penghasilan perbulanya sekira Rp 2.500.000,-(dua jutah lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2013 terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak saksi.
- Bahawa saksi menerangkan awalnya setelah menikah dengan terdakwa sejak tanggal 09 September 1995, hubungan antara saksi dan terdakwa baik-baik saja dalam membina rumah tangga dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun sekira bulan Mei 2012 terdakwa menggugat saksi di Pengadilan Agama untuk bercerai sehingga saksi dan terdakwa bercerai namun satu minggu kemudian terdakwa mengurus kembali ke kantor urusan agama

untuk rujuk kembali dengan saksi, sehingga saksi dan terdakwa kembali hidup bersama. Namun sekira awal bulan Januari 2013, terdakwa tidak pernah lagi menafkahi saksi.

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

Saksi ST. ERNI NURSYAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan menerangkan adanya tindakan pidana penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri dan anak terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan antara Sdri. RATNA DG. RATANG dan terdakwa adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sejak bulan Januari 2013 sudah tidak pernah lagi menafkahi istri dan anak-anak terdakwa, dan sejak itu saksi yang menafkahi.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun penyebab sehingga terdakwa tidak lagi menafkahi Sdri. RATNA DG. RATANG karna terdakwa sudah kenal dengan perempuan lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Aneka Gas Kawasan Industri Makassar.

Saksi SUTINAH KARIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab di mintai ke terangnya sehubungan dengan menerangkan adanya tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri dan anak-anak terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan antara Sdri.RATNA DG. RATANG dan terdakwa adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sejak bulan januari 2013 sudah tidak pernah lagi menafkahi istri dan anak-anak terdakwa, dan sejak itu saksi yang menafkahi.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun penyebab sehingga terdakwa tidak lagi menafkahi Sdri. RATNA DG. RATANG karna terdakwa sudah kenal dengan perempuan lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa adalah seorang karyawan di PT. Aneka Gas di Kawasan Industri Makassar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah di buat pada saat terdakwa melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di dapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang

didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan hubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan di ajukan barang bukti dipersidangan maka unsure-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa olehkarna semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa di nyatakan terbukti secara menurut hukum dan majelis yakni akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindsrksn diri dari pelaksanaan hukuman yang akan di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan

seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (istri terdakwa) harus menafkahi anak-anaknya dari belas kasih keluarga.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

2. Amar Putusan

- Menyatakan terdakwa HARIS IBRAHIM DG. LIMPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Keluarga dalam lingkup rumah tangga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah)

3. Unsur pertimbangan

Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu dakwaan tunggal pasal 49 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang :

Bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau subjek pelaku / siapa pelaku yang mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dalam persidangan ini, HARIS IBRAHIM DG LIMPO di ajukan sebagai terdakwa atau subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan pidanya kepadanya yang dapat terlihat dari sepanjang persidangan perkara dilangsungkan, keadaan, sikap terdakwa telah dewasa, dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan,dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi dan surat serta keterangan terdakwa sendiri yang diperoleh di sidang pengadilan telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan pelantaran terhadap saksi korban RATNA DG. RATANG, dengan cara terdakwa yang masih berstatus sebagai suami sah (berdasarkan Kutipan Akte Nikah No.428/24/VII/1996 tanggal 09 September 1995) dari korban telah meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2013, dimana sejak saat itu terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban member nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saksi korban, hanya bergantung pada sanak sodara yang merasa iba kepada si korban. Bahwa terdakwa masih bekerja sebagai karyawan PT. Gas Samator, sehingga terdakwa masih mempunyai penghasilan tetap untuk dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak terdakwa. bahwa hubungan terdakwa HARIS IBRAHIM DG. LIMPO dan Pr.RATNA DG. RATANG masih sebagai suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah karena belum pernah ada perceraian melalui Pengadilan Agama.

Dengan demikian unsur “ Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa HARIS IBRAHIM DG. LIMPO telah melakukan tindak pidana “Pelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana di atur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Analisis Penulis

Menurut Penulis, kasus penelantaran keluarga pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No:429/Pid.Sus/2015/PN.Mks dapat dilihat bagaimana hakim menentukan kriteria dari penelantaran keluarga itu sendiri. Majelis hakim dalam memutus dan menentukan kriteria tindak pidana penelantaran keluarga yang menjadi pijakan utama dalam melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diajukan pada putusan Pengadilan Negeri No: 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks adalah dakwaan tunggal dengan No.Rek:PDM-136/Mks/Ep.1/01/2015 sudah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Penjatuan pidana kepada terdakwa dalam Pengadilan Negeri Makassar sangatlah cenderung ringan, tujuan dari penjatuan pidana pelaku adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak terulang lagi kasus seperti ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penjatuan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidan tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan didalam hukum bahwa

pidana sebagai ultimum remedium yaitu sebagai obat terakhir penjatuhan pidana. Tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah di upayakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan bahwa :

1. Penerapan hukum materil pada kasus penelataran dalam rumah tangga dengan dakwaan tunggal No. PDM-136/MKS/Ep.1/01/2015 dengan penerapan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tepat karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkahkan hal itu terungkap didalam persidangan dan perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh Perundang-undangan sesuai dengan

kejahatan dan perbuatan yang dilakukannya akibat perbuatan itu pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Sementara menurut Penulis, pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan, karena itu pemeriksaan yang didasarkan pada dakwaan dan tuntutan yang mana tuntutan JPU menurut Penulis sah karena dakwaan dan tuntutan saling berkesesuaian. Dan hakim mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan JPU, dan hakim mempertimbangkan seluruh berkas perkara, dan akibat langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu hakim mempertimbangkan semua unsur yang ada, yaitu hakim mempertimbangkan unsur Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004, selanjutnya menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur yang dipertimbangkan oleh hakim.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan

saran agar:

1. Budaya patriarki yang pada hampir setiap daerah di Indonesia sering menyudutkan kaum wanita dalam hal ini para istri yang sering menjadi korban kekerasan terutama tindak penelantaran yang di lakukan oleh suaminya harus di rubah dalam presepsi masyarakat dimana di harapkan adanya penyuluhan kepada seluruh masyarakat oleh pemerintah tentang adanya Undang-Undang yang telah melarang tindakan tersebut. Penyuluhan tersebut diharapkan dilakukan hingga ke pelosok daerah terpencil dan pedesaan. Pengaturan tindak pidana penelantaran rumah

tangga yang seringkali korbannya adalah perempuan atau para istri sebagai delik aduan sering memposisikan para istri dalam keadaan yang terdesak, karena di satu sisi adanya anggapan bahwa pengaduan terhadap aparat penegak hukum justru akan mencoreng nama baik keluarga dan membuka aib keluarga kepada masyarakat umum. Oleh sebab itu maka diharapkan bagi seluruh kalangan untuk turut berpartisipasi membantu para istri untuk mengadukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh para suami.

2. Penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga dalam hal ini penelantaran istri oleh suami masih belum memberikan perlindungan terhadap kepentingan para istri dalam hal ini perlindungan secara ekonomi, oleh sebab itu di harapkan adanya perpanjangan tangan oleh pemerintah dalam membantu para istri dimana adanya sosialisasi terhadap para istri yang telah diterlantarkan oleh suaminya untuk dapat hidup mencari nafkahnya hingga para istri tersebut dapat mandiri dalam menafkahi hidupnya apalagi adanya anak yang menjadi tanggungan baginya setelah diterlantarkan oleh suaminya. Juga dalam hal putusan hakim seharusnya memberikan putusan agar para suami yang menelantarkan istrinya tetap untuk menafkahi istri yang telah diterlantarkan beserta anak yang di tinggalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal. 1995, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri. 2005. *Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta

_____. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

_____. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo : Jakarta.

Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013)

J.E Sahetapy, et.al, Hand Out Hukum Pidana, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2012, h.15

Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika : Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta,

1991, h.11

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*.
Bandung: Citra Aditya

Peri Umar Farouck. 2015, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Women Legal Empowerment program, justice for the
poor project*. Sinar Grafika Jakarta

Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.
Bandung: Eresco.

R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni,
Bandung, 1982, h.246

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif
Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Dari Rancangan Undang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. Bandung : Fokus
Media

Dari Internet Atau Jurnal

[http://www.djpp.depkmham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/85-
penghapusan-kekerasan dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-
sistem-hukum yang responsif-gender](http://www.djpp.depkmham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/85-penghapusan-kekerasan_dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum_yang_responsif-gender)>[20 januari 2010 pukul 07.18]

Fajar Utomo. *Berani Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
<http://cetak.fajar.co.id/kolom/news.php?newsid=272>. [11 januari 2010]

Solar Energi Charity. *Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah
Tangga* <http://jurnal-hukum.blogspot.com/2007>